

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Menurut Lopa (1996: 1) dalam Nurdjana (2005: 31-32), ketidakberdayaan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum bukan disebabkan oleh lemahnya undang-undang, melainkan karena faktor kelemahan sistem. Faktor kelemahan sistem merupakan produk integritas moral. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam perbaikan sistem tergantung pada integritas moral, karena yang memiliki pemikiran bahwa sistem harus diperbaiki adalah orang yang bermoral. Orang yang berilmu namun tidak bermoral tidak akan terdorong untuk memperbaiki sistem, bahkan akan menggunakan kesempatan dari kelemahan sistem tersebut.

Upaya pemberantasan korupsi memerlukan keteladanan yang dimulai dari kalangan atas. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi diberbagai

kalangan mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta.

Berikut data pelaku korupsi tahun 2005-2013.

Tabel I.1
Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2005-2013

Jabatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Kepala Lembaga/ Kementerian	1	1	0	1	1	2	0	1	4	11
Duta Besar	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
Komisioner	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7
Gubernur	0	2	0	2	2	1	0	0	2	9
Walikota/Bupati dan Wakil	0	3	7	5	5	4	4	4	3	35
Eselon I /I /III	9	15	10	22	14	12	15	8	7	112
DPR dan DPRD	0	0	2	7	8	27	5	16	8	73
Hakim	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8
Swasta	4	5	3	12	11	8	10	16	24	93
Lainnya	6	1	2	4	4	9	3	3	8	40
Jumlah	23	29	27	55	45	65	39	50	59	392

Sumber: Acch.kpk.go.id

Berdasarkan tabel I.1 memperlihatkan siapa saja pelaku korupsi berdasarkan jabatan. Terlihat bahwa Eselon I, II, dan III merupakan yang paling banyak melakukan korupsi dan pejabat negara yang lain juga tidak mau ketinggalan dengan ikut andil dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Arif (1997: 4) dalam Nurdjana (2005: 70), korupsi berkaitan erat dengan tingkat kompleksitas masalah, diantaranya: masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, budaya politik, peluang yang ada di dalam

mekanisme pembangunan, kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum.

Menurut *Corruption Perception Index* (CPI) yang diterbitkan oleh *Transparency International* pada tahun 2013 Indonesia berada pada urutan 114 dari 177 negara yang disurvei. CPI adalah indeks gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi yang dilakukan pejabat publik dan politisi, data diperoleh dari berbagai institusi terpercaya. Skor CPI berada diantara 0 sampai dengan 100. Skor 0 menunjukkan bahwa suatu negara sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa suatu negara sangat bersih.

Tabel I.2
Corruption Perception Index Negara ASEAN Tahun 2013

Negara	Skor CPI	Peringkat
Singapura	86	5
Brunei Darrussalam	60	38
Malaysia	50	53
Filipina	36	94
Thailand	35	102
Indonesia	32	114
Vietnam	31	116
Myanmar	21	157

Sumber : Transparency International

Corruption Perception Index yang disajikan dalam tabel I.2, Indonesia memperoleh skor 32, hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tergolong tinggi serta negara Indonesia belum bisa keluar dari permasalahan ini, dengan demikian pemerintah harus menangani masalah tersebut secara serius.

Ata dan Arvas (2011), Shabbir dan Anwar (2007), pembangunan ekonomi yang dilihat dari PDB per kapita menjadi penentu korupsi. Dengan meningkatnya PDB per kapita dapat menurunkan korupsi, hal ini dikarenakan perekonomian masyarakat membaik. Sedangkan menurut Silaen dan Sasana (2013) dan Nugroho (2012), menyatakan bahwa semakin tinggi produk domestik bruto akan meningkatkan korupsi. Karena semakin makmur suatu negara, maka perekonomiannya akan maju. Tanpa adanya upaya untuk menekan terjadinya korupsi maka akan menjadi sumber praktik korupsi, karena yang dikorupsi semakin banyak.

Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah perempuan seperti kasus Wisma Atlit dan Kementrian Pendidikan Nasional Angelina Sondakh, penggelapan dana nasabah Citi Bank Melinda Dee, menunjukkan bahwa perempuan juga turut andil dalam korupsi. Menurut Kencono dan Wardhana (2012), perempuan dan korupsi tidak ada hubungannya dengan identitas perempuan, tetapi tentang persoalan kekuasaan dan kesempatan. Tidak bisa dipungkiri perempuan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Peran perempuan sebagai ibu, istri, pergaulan di lingkungan kerja adalah kekuatan dominan dalam hal pemberantasan korupsi.

Menurut Badan Pusat Statistik, angka melek huruf merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Nugroho (2012), apabila tingkat pendidikan meningkat akan membuat seseorang semakin sadar akan etika dan moral serta hukum sehingga

menghindari tindakan tercela dan melawan hukum, termasuk tindakan korupsi.

Keterbukaan ekonomi membuka peluang terjadinya perdagangan luar negeri dan arus modal masuk dan keluar dari suatu negara. Hartanto (2014), tantangan perekonomian Indonesia adalah tingkat korupsi yang masih tinggi, menyebabkan kegiatan pembangunan dan upaya kesejahteraan rakyat tidak optimal, serta menghambat investasi. Selain itu menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan daya saing yang rendah. Sehingga diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan manajemen ekonomi suatu negara, agar bisa menurunkan biaya untuk melakukan investasi dan menjadi daya tarik investor asing untuk berinvestasi (Nugroho, 2012).

Penelitian terdahulu mengenai korupsi dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain: Silaen dan Sasana (2013), Nugroho (2012), Ata dan Arvas (2011), Bowman dan Giligan (2008), Shabbir dan Anwar (2007).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Hubungan Produk Domestik Bruto, Partisipasi Perempuan Bekerja, Angka Melek Huruf, Keterbukaan Ekonomi, dengan Tingkat Korupsi Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan menganalisis hubungan produk domestik bruto, partisipasi perempuan bekerja, angka melek huruf, keterbukaan ekonomi, dengan tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2005-2013. Sehingga dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan produk domestik bruto dengan tingkat korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan partisipasi perempuan bekerja dengan tingkat korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan angka melek huruf dengan tingkat korupsi di Indonesia?
4. Bagaimana hubungan keterbukaan ekonomi dengan tingkat korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris hubungan produk domestik bruto dengan tingkat korupsi di Indonesia.
2. Membuktikan secara empiris hubungan partisipasi perempuan bekerja dengan tingkat korupsi di Indonesia.
3. Membuktikan secara empiris hubungan angka melek huruf dengan tingkat korupsi di Indonesia.

4. Membuktikan secara empiris hubungan keterbukaan ekonomi dengan tingkat korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait kebijakan pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait hubungan produk domestik bruto, partisipasi perempuan bekerja, angka melek huruf, keterbukaan ekonomi dengan tingkat korupsi di Indonesia.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, bahan rujukan atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis agar mempermudah dalam memahami penelitian ini. Secara garis besar masing- masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang diadakannya penelitian ini, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.